



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : STRATEGIC PLANNING AND BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTORATE

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HERU KUSWANTO
2. Jabatan : CORPORATE DEPUTY DIRECTOR OF ASSETS DEVELOPMENT
3. NHK : 90146

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.063.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/200 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.640.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/230 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.533.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/285 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.590.000.000
4. Tanah Seluas 302 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 238.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI 175CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, CHEVROLET TRAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 178.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 19.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 441.401.376**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 5.761.901.376**III. HUTANG** Rp. 1.649.515.596**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.112.385.780

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.